



Langkah Berani Ahok

Jatah BBM Subsidi DKI Dipangkas

Jakarta, Harian Nusantara- Badan Pengatur Hilit Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengurangi jatah bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk DKI Jakarta. Ini menyikapi rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menghapus BBM subsidi di wilayahnya.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

"BPH Migas telah melakukan sidang pada 4 April 2014 lalu, salah satu hasil sidang komite tersebut memutuskan mengurangi jatah BBM subsidi baik premium maupun solar subsidi," kata Fanshurullah.

Ia mengungkapkan, jatah premium DKI Jakarta di 2013 sebanyak 2.213.720 kilo liter (KL), di 2014 ini dikurangi menjadi hanya 2.168.085 KL. Sedangkan untuk jatah solar subsidi, dari 905.316 KL di 2014 menjadi hanya 787.211 KL di 2014.

"Untuk premium dikurangi 2,1% untuk solar dikurangi 13%," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Ifan ini mengatakan, pengurangan jatah BBM subsidi untuk DKI Jakarta ini menyalurkan rencana Pemprov DKI menghapuskan BBM subsidi di wilayahnya.

"Jadi ini kita turunkan untuk merespons kebijakan Wakil Gubernur Ahok (Basuki T. Purnama). Ini langkah yang berani sebagai Wagub dan langkah ini bagus karena menghemat anggaran pemerintah," ungkapnya. (Detik.com)

(点滴网雅加达讯)石油与天然气下游业管制机构(BPH Migas)减少了供应雅加达首都专区的补贴燃油配额。这是为了回应雅京省政府欲消除该地区补贴燃油的计划。

BPH Migas副主席凡斯胡鲁拉(Fanshurullah Asa) 5月1日说，该机构已于上月4日举行会议，会议的结果之一，即是决定减少雅京补贴燃油的配额，包括补贴premium汽油和柴油。

他披露，首都雅加达在2013年的premium汽油配额为221万3720千升(KL)，在2014年将减少到216万8085 KL。而补贴柴油配额将从去年90万5316 KL减至今年78万7211 KL。他说：“Premium汽油将减少2.1%，柴油则减少13%。”

昵称伊凡的这位男子续称，当局是在雅京省政府计划取消首都地区的补贴燃油后，决定减少雅加达的补贴燃油配额。“因此，我们决定减少雅加达的补贴燃油配额，以回应雅京副省长钟万学的措施。这是副省长敢于采取果断和良好的步骤，因为这项措施能为政府节省预算。” (HS)

RUMAH SUBSIDI Terancam Langka Meski Harga Dinaikkan

补贴房屋仍将面临短缺

Bandung, Harian Nusantara- Realestate Indonesia (REI) Wilayah Jawa Barat menyatakan rumah subsidi tetap akan langka walaupun Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) telah menetapkan kenaikan harga rumah subsidi.

Ketua REI Jabar Yana Mulyana mengatakan pengembang tetap bakal menahan pembangunan rumah subsidi selama pemerintah belum membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% terhadap rumah subsidi.

Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus menanggung pajak sebesar Rp11,5 juta dari harga baru rumah subsidi di Jabar Rp115.

“Menpora minta pengembang segera membangun, tetapi siapa yang mau beli rumah subsidi dengan beban pajak? Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sanggup membayar pajak yang nilainya besar itu. Pengembang pun akan rugi kalau sudah bangun tetapi tidak ada yang beli,” katanya kepada Redaksi, Kamis (1/5/2014).

Yana menilai beban pajak tidak bisa dibebankan kepada MBR seperti yang pernah diusulkan Menpora Djanz Faridz. Hal ini karena nilai pajak tidak sedikit. Yana menyebut MBR di Jabar harus men